



**PERAYAAN ALL SOULS' DAY MASS DI ROMA**

Paus Fransiskus meninggalkan perayaan All Souls' Day Mass di Pemakaman Militer Prancis di Roma, Italy, Selasa (2/11).

## Banyak Wanita Pekerja Bunuh Diri Saat Pandemi di Jepang

Angka bunuh diri di wanita Jepang meningkat 935 kasus menjadi 7.026 pada 2020.

**ISTANBUL (IM)** - Di Jepang, aksi bunuh diri memiliki sejarah panjang, yaitu sebagai suatu cara untuk menghindari rasa malu atau aib. Jepang telah lama menjadi negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara-negara Kelompok Tujuh (G7).

Meskipun demikian, negara tersebut tidak berdamai diri. Pahalanya, upaya nasional telah

menurunkan angka bunuh diri sekitar 40 persen selama 15 tahun, termasuk penurunan kasus selama 10 tahun berturut-turut mulai dari 2009.

Namun, di tengah pandemi, kasus bunuh diri di Jepang meningkat pada 2020 setelah satu dekade menurun dengan jumlah wanita yang melakukan bunuh diri melonjak di tengah tekanan emosional dan

finansial yang disebabkan oleh pandemi virus corona.

Menurut laporan pemerintah, kasus bunuh diri di kalangan wanita pekerja di Jepang melonjak selama pandemi.

Media NHK melaporkan bahwa Buku Putih tentang pencegahan bunuh diri yang disetujui pemerintah menunjukkan jumlah kasus bunuh diri di kalangan wanita meningkat 935 kasus menjadi 7.026 kasus pada 2020.

"Ini menunjukkan bisa jadi karena perubahan kondisi kerja yang disebabkan oleh penyebaran infeksi virus korona," kata laporan itu.

Sementara itu, jumlah kasus bunuh diri yang dilakukan

kaum pria mengalami penurunan, yaitu turun 23 menjadi 14.055 kasus. "Ini adalah penurunan ke-11 berturut-turut," katanya yang dikutip dari Anadolu Agency, Rabu (3/11).

Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 21.081 orang mengakhiri hidup (bunuh diri) di Jepang pada tahun lalu atau meningkat sebanyak 912 kasus dari 2019. "Ini adalah peningkatan tahun ke tahun pertama sejak 2009. Peningkatan sebelumnya mengikuti krisis keuangan global 2008," kata laporan itu.

Peningkatan terbesar dalam kasus bunuh diri di antara wanita yang bekerja terlihat pada laporan adanya perawatan kesehatan yang tengah dijalani. "Karyawan yang bekerja di kantor memberikan perawatan kesehatan atau menyediakan jenis layanan lain," katanya. Menurut laporan, salah satu faktor meningkatnya kasus bunuh diri di Jepang terhadap kaum wanita, yaitu perubahan dalam lingkungan kerja dan hubungan dengan orang lain. "Ada peningkatan jumlah kasus di mana perubahan dalam lingkungan kerja dan hubungan dengan orang lain di tempat kerja disebut-sebut sebagai kemungkinan alasan atau motif bunuh diri perempuan tersebut," katanya. **tom**

## Prancis Tangguhkan Sanksi Penangkapan Ikan pada Inggris

**LONDON (IM)** - Presiden Prancis Emmanuel Macron menunda rencana membatalkan sanksi dagang pada Inggris. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat bernegosiasikan proposal baru untuk meredakan perselisihan mengenai hak-hak penangkapan ikan pasca-Brexit.

Sebelumnya, Prancis mengatakan, mulai Senin (1/11) mereka akan menerapkan pembatasan perdagangan lintas selat. Hal ini mengancam perselisihan mengenai perikanan menjadi sengketa perdagangan yang lebih luas antara dua perekonomian besar di Eropa.

Namun, Macron mengatakan, Prancis akan menahan rencana tersebut untuk menggelar pembicaraan baru. Hal itu ia sampaikan setelah bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam pertemuan sela Konferensi Perubahan Iklim di Glasgow, Skotlandia.

"Sejak sore ini, diskusi dilanjutkan berdasarkan proposal yang saya sampaikan ke Perdana Menteri (Boris) Johnson, pembicaraan harus dilanjutkan," kata Macron, Rabu (3/11).

"Yang saya pahami Inggris akan kembali ke kami dengan proposal yang lain, semuanya akan dikerjakan. Kami akan melihat di mana kami besok untuk melihat apakah ada hal yang benar-benar berubah. Saya berharap kami dapat menemukan jalan keluar pada isu-isu ini," ujar Macron.

Di Twitter, Menteri Urusan Eropa Clement Beaune mengatakan, sanksi perdagangan tidak akan diberlakukan sebelum ia bertemu dengan Menteri Brexit Inggris David Frost di Paris, Kamis (4/11). Britania menyambut baik keputusan tersebut.

"Kami menyambut kesadaran Prancis dibutuhkan diskusi mendalam untuk menyelesaikan berbagai kesulitan hubungan Inggris/Uni Eropa," kata juru bicara Pemerintah Inggris dalam pernyataannya.

Juru bicara Pemerintah Inggris menambahkan, Frost menerima undangan Beaune. Sebelumnya Inggris memberi Prancis 48 jam untuk menarik ancaman sanksi atau menghadapi aksi hukum berdasarkan kesepakatan dagang Brexit.

Langkah-langkah yang diancam Prancis antara lain meningkatkan cukai perbatasan

dan sanitasi barang dari Inggris serta melarang kapal Inggris berlabuh di pelabuhan Prancis. Langkah ini berpotensi mengganggu perdagangan lintas selat.

"Prancis membuat ancaman yang tidak masuk akal, termasuk pada Kepulauan Channel dan industri perikanan kami. Mereka harus menarik ancaman-ancaman itu atau kami akan mengambil tindakan dengan menggunakan mekanisme perjanjian dagang kami dengan Uni Eropa," kata Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss.

Kepulauan Channel terdiri atas sekelompok pulau di lepas pesisir Normandia, Prancis, di Selat Inggris. Selama beberapa dekade, Inggris dan Prancis berselisih mengenai akses penangkapan ikan di pinggir pantai Kepulauan Channel.

Masalah perikanan mengganggu negosiasi yang mendorong Inggris keluar dari Uni Eropa. Bukan karena kepentingan ekonomi, tapi lebih pada signifikansi politik.

Pemerintah Inggris menegaskan kembali kendali Britania pada perairan penangkapan ikan menjadi isu utama yang Johnson presentasikan pada pemilu dalam referendum Brexit. Sementara Macron akan menajalin pemilihan umum tahun depan dan harus tegas membela nelayan-nelayan Prancis, konstituen politik yang vokal.

Perselisihan pecah pada September setelah Paris menuduh London gagal memberikan izin yang cukup pada kapal-kapal nelayan Prancis untuk beroperasi di perairan Inggris. Britania mengatakan sudah mengeluarkan izin pada kapal-kapal yang dapat membuktikan mereka mencari ikan di perairan itu sebelumnya.

Bukti tersebut diminta nelayan-nelayan Inggris yang cemas nelayan Prancis merebut keuntungan dari mereka. Pada Rabu (26/10) lalu pihak berwenang Prancis menyita kapal keruk kerang Cornelis Gert Jan di perairan Prancis dekat le Havre. Langkah ini membuat berang Inggris.

Berdasarkan data pelacakan kapal nelayan dan perwakilan industri Prancis, pada Senin sore kapal-kapal nelayan Inggris dan Prancis saling menjauh. Tampaknya mereka menghindari ancaman saat tenggat waktu ketetapan Prancis semakin dekat. **gul**

## Taliban Larang Penggunaan Mata Uang Asing di Afghanistan

**TOKYO (IM)**-Taliban mengumumkan larangan total penggunaan mata uang asing di Afghanistan. Penggunaan mengutipkan itu datang beberapa jam setelah serangan senjata dan bom terkoordinasi di rumah sakit militer terbesar Afghanistan di ibukota, Kabul. "Imarah Islam menginstruksikan semua warga, pemilik toko, pedagang, pengusaha dan masyarakat umum untuk melakukan semua transaksi di Afghanistan dan secara ketat menahan diri dari menggunakan mata uang asing," kata Taliban dalam sebuah pernyataan yang diposting oleh juru bicara Zabihullah Mujahid.

"Siapa pun yang melanggar perintah ini akan menghadapi tindakan hukum," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (3/11).

Penggunaan dolar Amerika Serikat (AS) tersebar luas di pasar Afghanistan, sementara daerah perbatasan menggunakan mata uang negara tetangga seperti Pakistan untuk perdagangan. Pemerintah Taliban mendesak untuk melepaskan miliaran dolar cadangan bank sentral ketika negara yang dilanda

kekeringan itu menghadapi krisis uang tunai, kelaparan massal, dan krisis migrasi baru.

Pemerintah Afghanistan sebelumnya yang didukung Barat telah memarkir miliaran dolar aset di luar negeri seperti Federal Reserve AS dan bank sentral lainnya di Eropa. Tetapi setelah Taliban mengambil alih negara itu pada bulan Agustus, AS serta Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) memutuskan untuk memblokir akses Afghanistan ke aset dan pinjaman lebih dari USD9,5 miliar.

Keputusan itu berdampak buruk pada perawatan kesehatan Afghanistan dan sektor lainnya, yang semuanya berujung untuk melanjutkan operasi di tengah pengurangan bantuan internasional.

Dengan cepatnya musim dingin yang keras datang, Sulaiman Bin Shah, mantan wakil menteri industri dan perdagangan Afghanistan, mengatakan kepada Al Jazeera akhir bulan lalu bahwa orang-orang Afghanistan membayar harga yang sangat mahal karena lambatnya proses diplomatik dan negosiasi.

Program Pangan Dunia mengatakan sekitar 22,8 juta orang - lebih dari setengah dari 39 juta penduduk Afghanistan - menghadapi kerawanan pangan akut dan "berbaris menuju kelaparan", dibandingkan dengan 14 juta hanya dua bulan lalu.

Krisis pangan, yang diperburuk oleh perubahan iklim, sangat mengerikan di Afghanistan bahkan sebelum pengambilalihan oleh Taliban.

Kelompok-kelompok bantuan mendesak negara-negara, yang prihatin dengan hak asasi manusia di bawah Taliban, untuk terlibat dengan penguasa baru guna mencegah keruntuhan yang mereka katakan dapat memicu krisis migrasi serupa dengan eksodus 2015 dari Suriah yang menguncang Eropa.

Kepergian pasukan pimpinan AS dan banyak donor internasional meninggalkan negara itu tanpa hibah yang membiayai tiga perempat belanja publik.

Kementerian Keuangan Afghanistan mengatakan pihaknya mengambil pajak harian sekitar USD4,4 juta. **ans**

## Irak Bayar Ganti Rugi Perang ke Kuwait

**BAGHDAD (IM)**- Irak mengumumkan baru-baru ini membayar 490 juta dolar AS sebagai ganti rugi perang kepada Kuwait. Jumlah tersebut telah ditentukan oleh Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) atas invasi pada 1990. "Irak membayar kompensasi sebesar 490 juta dolar AS pada Selasa lalu dari jumlah yang ditentukan oleh PBB atas invasi rezim yang digulingkan ke Kuwait pada awal 1990-an," kata Kedutaan Besar Irak di Kuwait

dalam sebuah pernyataan.

Dalam pernyataan itu, Irak akan bekerja untuk membayar sisa kompensasi pada awal 2022. Baghdad masih memiliki sisa pembayaran hingga 629 juta dolar AS. Pada 1991, PBB mewajibkan Baghdad untuk membayar 52,4 miliar dolar AS sebagai kompensasi kepada individu, perusahaan, organisasi pemerintah, dan lainnya yang mengalami kerugian akibat invasi Irak ke Kuwait. Irak menghentikan pembayaran kom-

pensasi pada 2014 karena perang melawan ISIS, yang menguasai sepertiga negara itu, tetapi melanjutkan pembayaran pada 2018.

Invasi Irak ke Kuwait disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Irak setelah Perang Delapan Tahun dengan Iran dan beberapa masalah, termasuk masalah ladang minyak di Rumaila dan melanggar batas wilayah. Ribuan orang meninggal akibat keputusan pasukan Irak yang dipimpin Saddam Hussein menyerbu Teluk Kuwait. **tom**

## Ethiopia Umumkan Darurat Nasional

**ADDIS ABABA (IM)** - Pemerintah Ethiopia mengumumkan keadaan darurat nasional menyusul pasukan pemberontak Tigray yang membuat keuntungan teritorial dengan bergerak lebih dekat ke Ibu Kota. Parlemen Ethiopia harus menyetujui deklarasi itu dalam waktu 48 jam agar keadaan darurat nasional mulai berlaku.

"Keadaan darurat bertujuan untuk melindungi warga sipil dari kekejaman yang dilakukan oleh kelompok teroris TPLF (Front Pembebasan Rakyat Tigray) di beberapa bagian negara," kata outlet media milik negara, Fana Broadcasting Corporate, yang dikutip Sputnik, Rabu (3/11).

Sebelumnya, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed meminta warga mengangkat senjata untuk mempertahankan tanah air mereka dari pasukan TPLF. TPKF dilaporkan berhasil merebut dua kota di selatan provinsi Tigray dan mencatat bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk bergerak lebih jauh menuju Ibu Kota Addis Ababa, yang terletak 380 kilometer jauhnya. Klaim dari dua kota yang direbut oleh TPLF belum dikonfirmasi secara resmi.

Konflik antara pemerintah Ethiopia dan TPLF meletus pada November 2020, setelah

Tigray mengadakan pemilihan kepala daerah yang bertentangan dengan perintah Addis Ababa untuk menunda pemilihan karena pandemi.

TPLF, yang memerintah negara itu selama hampir dua dekade, berada pada posisi yang kurang menguntungkan. TPLF kalah dalam pemilihan terakhir dari blok partai oposisi yang baru dibentuk yang disebut Partai Kemakmuran. TPLF mengklaim bahwa kewenangan pemerintah telah berakhir pada 2020, baik karena pandemi COVID-19 atau tidak, sehingga pemerintah Addis Ababa dianggap tidak sah karena gagal menyelenggarakan pemilu.

Sebaliknya, pemerintah di Addis Ababa menyatakan pemilihan Tigray ilegal dan melancarkan operasi terhadap wilayah "pemberontak" pada 3 November 2020. Operasi ini dibantu oleh Pasukan Pertahanan Eritrea (EDF).

Pasukan pemerintah Ethiopia berhasil merebut Ibu Kota wilayah Mekelle dan menyatakan operasi itu berakhir. Namun, TPLF terus berjuang dengan bantuan tentara Angkatan Pertahanan Nasional Ethiopia yang membelot, serta sukarelawan sipil setempat, merebut kembali Mekelle pada Juni 2021. **gul**

## UNICEF: 1 Miliar Anak Terdampak Perubahan Iklim

**JENEWA (IM)**-Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) pada Rabu (3/11) mengatakan, sekitar satu miliar anak di seluruh dunia menghadapi risiko sangat tinggi dari konsekuensi perubahan iklim. Penasihat senior UNICEF untuk iklim, energi, dan lingkungan, Gautam Narasimhan, mengatakan, dua pertiga dari rencana iklim negara tidak menangani kebutuhan dan prioritas anak-anak.

"Sementara para pemimpin berbicara tentang dampak krisis iklim pada anak-anak, terlalu sedikit yang mengubah kata-kata ini menjadi tindakan bermakna yang benar-benar mempertimbangkan anak-anak," ujar Narasimhan, dilansir Anadolu Agency, Rabu (3/11).

Narasimhan mengatakan, dari 103 negara yang merencanakan perubahan iklim, hanya 35 di antaranya atau sekitar sepertiga yang peka terhadap nasib anak-anak.

Pada Agustus, UNICEF menerbitkan Indeks Risiko Iklim Anak, yang mengungkap bahwa, 99 persen dari 2,2 miliar anak di dunia terkena setidaknya satu ancaman lingkungan, termasuk gelombang panas, angin topan, banjir, kekeringan, vektor-penyakit bawaan, polusi udara, dan kemucanan timbal. "Sekitar 1 miliar anak tinggal

di negara-negara yang berisiko sangat tinggi dari ancaman perubahan iklim. Anak-anak ini menghadapi guncangan iklim yang berlipat ganda, mengancam kesehatan, pendidikan, dan kelangsungan hidup mereka," kata Narasimhan.

Menurut Narasimhan, pengurangan emisi CO2 mungkin terlambat bagi anak-anak. Karena pengurangan emisi akan memakan waktu puluhan tahun. Narasimhan mengutip penilaian Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), bahwa sejak 2015 suhu di bumi telah meningkat. WMO menyatakan, 2021 dapat menjadi salah satu tahun terpanas.

Pada laporan terbaru Save the Children secara global "Born Into the climate Crisis" atau "Lahir pada Masa Krisis Iklim" menyerukan agar perlunya tindakan dan aksi yang harus dilakukan segera untuk melindungi hak-hak anak.

Secara global, anak-anak yang lahir pada 2020 akan menghadapi 7 persen lebih banyak kebakaran hutan, 26 persen lebih banyak gagal panen, 31 persen lebih banyak kekeringan, 30 persen lebih banyak banjir sungai, dan 65 persen lebih banyak gelombang panas jika pemanasan global dihentikan pada 1,5°C. **ans**



**PEMISAHAN BAYI KEMBAR ASAL KAMERUN**

Bayi kembar asal Kamerun Elizabeth dan Mary Awke berpose dengan orangtuanya Carolina dan Richard saat konferensi pers setelah operasi pemisahan sukses di Rumah Sakit Acibadem Altunizade di Istanbul, Turki, Selasa (2/11).

## Bahrain Minta Warganya Segera Meninggalkan Lebanon

**MANAMAH (IM)**-Kementerian luar negeri Bahrain meminta warganya yang berada di Lebanon saat ini untuk segera pergi meninggalkan negara tersebut, Rabu (3/11). Keputusan ini diyakini sebagai imbas dari krisis yang dialami Lebanon yang telah mengalami kelumpuhan politik seputar penyelidikan ledakan pelabuhan Beirut.

Keretakan diplomatik juga menyebar ke negara-negara Arab Teluk lainnya. Bahrain juga memanggil Duta Besar Lebanon setelah Arab Saudi mengumumkan keputusannya. Pada Jumat (29/10) sore kemarin Mikati menelepon Kordahi.

Ia meminta menteriannya itu untuk mengedepankan kepentingan nasional lebih dulu. "Ambil keputusan yang tepat untuk memperbaiki hubungan Lebanon dengan Arab Saudi," kata pernyataan yang dirilis kantor presiden Lebanon.

Sumber yang mengetahui persoalan ini mengatakan eskalasi dengan Arab Saudi menambah tekanan Kordahi untuk mengundurkan diri demi menghindari konsekuensi yang lebih parah. Sebelumnya Mikati telah mengemukakan pemerintahnya berkomitmen memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi. **gul**



**KABUT TEBAL SELIMUTI KOTA MOSKOW**

Seorang pria memancing di kolam Golyanovo saat kabut tebal di Moskow, Rusia, Selasa (2/11).